

**SURVEY ZONA INTEGRITAS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN I (PERIODE JANUARI 2024 – MARET 2024)
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



**DISUSUN OLEH :
TIM SURVEY KEPUASAN PENGGUNA
PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, akhirnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyelesaikan hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada masyarakat, oleh karena itu kami mengadakan survei ini secara berkala sebagai bagian dari rencana dan sasaran mutu dalam pemeliharaan kualitas layanan yang telah dicapai. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pengguna dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini bertujuan meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang diambil dengan menggunakan aplikasi e-Survey yang dikembangkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan - perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas dan masyarakat pengguna layanan kami.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 April 2024

Tim Survei

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEY ZONA INTEGRITAS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN IV TAHUN 2023 DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Yogyakarta
Pada Hari Jumat, 17 April 2024

Ketua



Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,MH

Sekretaris Utama



Meilyna Dwijanti, S.H.,MH

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	1
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	2
<u>BAB I</u>	4
<u>PENDAHULUAN</u>	4
<u>A. LATAR BELAKANG</u>	4
<u>B. TUJUAN DAN SASARAN</u>	4
<u>C. RENCANA KERJA PELAKSANAAN</u>	4
<u>D. TAHAPAN PELAKSANAAN</u>	Error! Bookmark not defined.
1. <u>Persiapan</u>	Error! Bookmark not defined.
2. <u>Pelaksanaan Pengumpulan Data</u>	5
3. <u>Metode Survey</u>	5
<u>E. TARGET CAPAIAN PEKERJAAN</u>	5
<u>BAB II METODOLOGI PENELITIAN</u>	6
<u>BAB III PROFIL RESPONDEN</u>	7
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA</u>	9
<u>BAB V KESIMPULAN</u>	11
<u>LAMPIRAN</u>	14

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Laporan Survey Zona Integritas (ZI) Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 (periode Januari 2024 – Maret 2024) ini sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

3. RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Survey Zona Integritas (ZI) Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dilaksanakan pada periode Januari 2024 sampai dengan Maret 2024.

4. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

- a. Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- b. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

5. METODE SURVEY

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali setahun) menggunakan aplikasi *SiSuper Badilum*.

6. TARGET CAPAIAN PEKERJAAN

Target yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebanyak 37 responden untuk periode Survey Persepsi Anti Korupsi bulan Januari 2024 – Maret 2024.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

1. METODOLOGI SURVEY

Metode Survey ini merupakan penelitian Kuantitatif yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif.

2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Sebagai sample pada penelitian ini berjumlah 33 orang responden yg di ambil secara simple random sampling, terdiri dari:

1. PNS
2. TNI
3. POLRI
4. SWASTA
5. WIRUSAHA
6. TENAGA KONTRAK
7. LAIN-LAIN

3. TEKNIK ANALISA DATA

Setelah data terkumpul data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif yang sudah terintegrasi dalam *Aplikasi SiSuper Badilum*.

4. VARIABEL PENGUKURAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PERSEPSI ANTI KORUPSI

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pendoman Pelaksanaan Survey dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*) pada Direktorat Jendral Badan Peradilan umum yang terdiri dari 5 (lima) ruang lingkup antara lain:

1. Diskriminasi Pelayanan
2. Pelayanan Diluar Prosedur
3. Penerimaan Imbalan/Suap
4. Pungutan Liar
5. Praktik Percaloan

BAB III

PROFIL RESPONDEN

1. UMUR RESPONDEN

Dari hasil survei yang diperoleh data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*), pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 37 responden, umur pengguna layanan/responden ditampilkan dalam tabel berikut ini :

NO	Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
1	18 - 28 Th	6	16,22
2	29 - 39 Th	20	54,05
3	40 - 49 Th	7	18,92
4	50 - 59 Th	4	10,81
5	60 - 69 Th	0	0
Total		37	100

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum P N Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024.

Dan dapat disimpulkan mayoritas responden ini berumur 29 – 39 tahun yaitu 20 orang dari total 37 atau 54,05%.

2. PENDIDIKAN TERAKHIR RESPONDEN

Dari hasil survei yang diperoleh data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*), pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 37 responden, dan pendidikan terakhir pengguna layanan/responden ditampilkan dalam tabel berikut ini :

NO	JENIS PENDIDIKAN	FREKUENSI	
		JUMLAH	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMU	7	18,91
5	Diploma	1	2,70
8	S1	29	78,37
9	S2	0	0
10	S3	0	0
Jumlah		37	100

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum P N Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024.

Dan dapat disimpulkan bahwa mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah S1 yang berjumlah 29 orang dari total responden 37 orang atau 78,37%.

3. JENIS KELAMIN RESPONDEN

Dari hasil survei yang diperoleh data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*), pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 37 responden, dan jenis kelamin pengguna layanan/responden ditampilkan dalam tabel berikut ini :

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Laki - Laki	18	48,64
2	Perempuan	19	51,35
Jumlah		37	100

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum P N Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024.

Dan dapat disimpulkan mayoritas responden terbanyak berjenis kelamin Perempuan yang berjumlah 19 orang dari total 37 orang atau 51,35%.

4. PEKERJAAN UTAMA RESPONDEN

Dari hasil survei yang diperoleh data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*), pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 37 responden, dan pekerjaan pengguna layanan/responden ditampilkan dalam tabel berikut ini :

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	PNS	12	32,43
2	TNI	0	0
3	POLRI	2	5,40
4	Pegawai Swasta	8	21,62
5	Wirausaha	0	0
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Lainnya	15	40,54
Jumlah		37	100

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum P N Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024.

Dan mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah LAINNYA yang berjumlah 15 orang dari total responden 37 orang atau 40,54%.

5. DAERAH DOMISILI

Dari hasil survei yang diperoleh data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*), pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 37 responden dari domisili/tempat tinggal pengguna layanan/responden ditampilkan dalam tabel berikut ini:

NO	Daerah Domisili	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Jawa Tengah	2	5,40
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	34	91,89
3	Jawa Timur	1	2,70
Total		37	100

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum P N Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024.

Dan mayoritas Daerah Domisili Responden adalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 34 responden atau 91,89%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan di peroleh Survey Zona Integritas (ZI) Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 Unit Pelayanan sebesar 4,00 / 100 % yang berada pada kategori A (Sangat Baik). Analisis selanjutnya disajikan berdasarkan masing - masing ruang lingkup pelayanan:

A. DISKRIMINASI PELAYANAN

Hasil analisis pada ruang lingkup Diskriminasi Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

DISKRIMINASI PELAYANAN (U1)	
Jumlah	148
NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)	4,00
NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))	0,800

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum P N Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Diskriminasi Peraturan ini menunjukan hasil pada index 4,00 atau dalam nilai konversi 3,26 - 4,00 atau 81,26 – 100,00. Jika donversikan dengan nilai mutu layanan dalam kategori A atau **Sangat Baik**. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Diskriminasi Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk kedalam kategori **Sangat Baik** atau **TIDAK ADA DISKRIMINASI** dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00.

B. PELAYANAN DILUAR PROSEDUR

Hasil analisis pada ruang lingkup Pelayanan Diluar Prosedur secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR (U2)	
Jumlah	148
NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)	4,00
NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))	0,800

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum PN Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan diluar prosedur ini menunjukan hasil pada index 4,00 atau dalam nilai konversi 3,26 - 4,00 atau 81,26 – 100,00. Jika donversikan dengan nilai mutu layanan dalam kategori A atau **Sangat Baik**. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Pelayanan Diluar Prosedur di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori **Sangat Baik** atau **PELAYANAN SELALU SESUAI DENGAN PROSEDUR** dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00.

C. PENERIMAAN IMBALAN/SUAP

Hasil analisis pada ruang lingkup Penerimaan Imbalan/Suap secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

PENERIMAAN SUAP (U3)	
Jumlah	148
NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)	4,00
NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))	0,800

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum PN Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan/Suap ini menunjukan hasil pada index 4,00 atau dalam nilai konversi 3,26 - 4,00 atau 81,26 – 100,00. Jika donversikan dengan nilai mutu layanan dalam kategori A atau **Sangat Baik**. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Penerimaan Imbalan/Suap di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori **Sangat Baik** atau **PETUGAS TIDAK PERNAH MENRIMA IMBALAN/SUAP** dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00.

D. PUNGUTAN LIAR

Hasil analisis pada ruang lingkup Pungutan Liar secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

PUNGUTAN LIAR (U4)	
Jumlah	148
NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)	4,00
NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))	0,800

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum PN Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar ini menunjukan hasil pada index 4,00 atau dalam nilai konversi 3,26 - 4,00 atau 81,26 – 100,00. Jika donversikan dengan nilai mutu layanan dalam kategori A atau **Sangat Baik**. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Pungutan Liar di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori **Sangat Baik** atau **TIDAK PERNAH TERJADI PUNGUTAN LIAR** dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00.

E. PRAKTIK PERCALOAN

Hasil analisis pada ruang lingkup Praktik Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

PRAKTIK PERCALOAN (U5)	
Jumlah	148
NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)	4,00
NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))	0,800

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum PN Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukan hasil pada index 4,00 atau dalam nilai konversi 3,26 - 4,00 atau 81,26 – 100,00. Jika donversikan dengan nilai mutu layanan dalam kategori A atau **Sangat Baik**. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Praktik Percaloan di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori **Sangat Baik** atau **TIDAK PERNAH ADA PRAKTIK PERCALOAN** dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00.

BAB V KESIMPULAN

I. KESIMPULAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survey Zona Integritas (ZI) Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 Unit Pelayanan sebesar 4,00/100 % yang berada pada kategori A (Sangat Baik).

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Diskriminasi Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori *TIDAK ADA DISKRIMINASI* dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00/100%
2. Mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Pelayanan Diluar Prosedur di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori *PELAYANAN SELALU SESUAI DENGAN PROSEDUR* dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00/100%.
3. Mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Penerimaan Imbalan/Suap Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori *PETUGAS TIDAK PERNAH MENRIMA IMBALAN/SUAP* dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00/100%.
4. Mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Pungutan Liar di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori *TIDAK PERNAH TERJADI PUNGUTAN LIAR* dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00/100%
5. Mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Praktik Percaloan di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori *TIDAK PERNAH ADA PRAKTIK PERCALOAN* dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00/100%

II. 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH DAN TINDAK LANJUT

a. 3 (tiga) Unsur Terendah

Berdasar aplikasi SIUPER Badilum yaitu Perhitungan Indeks ZI Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap 37 responden pada triwulan I, memperoleh nilai hasil Survey 4,00 / 100% hasil ini masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Hasil Survey ZI Anti Korupsi tersebut merupakan rumusan dari 5 ruang lingkup/unsur yang memiliki indeks sebagai berikut :

No	Ruang Lingkup	Nilai Per RL	Kategori	Peringkat
1.	DISKRIMINASI PELAYANAN	4,00	Sangat Baik	5
2.	PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	4,00	Sangat Baik	4
3.	PENERIMAAN IMBALAN/SUAP	4,00	Sangat Baik	3
4.	PUNGUTAN LIAR	4,00	Sangat Baik	2
5.	PRAKTIK PERCALOAN	4,00	Sangat Baik	1

Dari ruang lingkup – ruang lingkup diatas terdapat 3 (tiga) ruang lingkup terendah dan perlu untuk ditindak lanjuti, yaitu :

1. Diskriminasi Pelayanan.
2. Pelayanan Diluar Prosedur.
3. Penerimaan Imbalan/Suap.

A. Tindak Lanjut Terhadap 3 (tiga) Unsur Terendah

Terhadap 3 (tiga) unsur terendah hasil Indeks Survey ZI Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta masih masuk dalam kategori sangat baik atau dalam nilai A. Namun perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah tersebut dengan cara :

1. Diskriminasi Pelayanan.

Dari hasil survey yang diambil dari aplikasi SiSuper di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta diperoleh data seperti tabel berikut ini :

PERSYARATAN DAN PELAYANAN (U1)	
Jumlah	148
NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)	4,00
NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))	0,800

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari diskriminasi pelayanan karena mempunyai nilai NRR Per RL 4,00

Dalam hal ini semua pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan tidak ada diskriminasi pelayanan.

Untuk mempertahankan nilai tersebut segenap Pimpinan dan jajarannya selalu menekankan melalui apel pagi petugas PTSP agar melayani pengguna layanan dengan baik dan dengan sepenuh hati sesuai dengan SOP yang diberlakukan.

2. Pelayanan Diluar Prosedur

Unsur Pelayanan Diluar Prosedur memiliki nilai Per RL 4,00 seperti hasil survey SiSuper seperti tabel berikut ini :

PENYALAHGUNAAN JABATAN (U2)	
Jumlah	148
NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)	4,00
NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))	0,800

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa semua pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa pelayanan telah sesuai prosedur.

Untuk mempertahankan hal tersebut dalam setiap kesempatan pertemuan rutin ditekankan kepada khususnya petugas layanan agar melayani pengguna layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan selalu merapkan SMAP (Sistim Manajemen Anti Penyuapan)

3. Penerimaan Imbalan/Suap

Unsur penerimaan imbalan/suap juga mempunyai nilai Per RL 4,00 hal ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta seperti tabel dari hasil survey SiSuper berikut ini :

PENERIMAAN SUAP (U3)	
Jumlah	148
NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))	0,800

Dari tabel diatas dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari pemberian imbalan/suap.

Untuk mempertahankan hal tersebut dalam setiap kesempatan pertemuan rutin ditekankan kepada khususnya petugas layanan agar melayani pengguna layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan selalu merapkan SMAP (Sistim Manajemen Anti Penyuapan)

Demikian tindak lanjut atas 3 (tiga) unsur terendah dari laopran survey ZI Persepsi Kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

LAMPIRAN

TANGKAPAN LAYAR HASIL SURVEY ZONA INTEGRITAS (ZI) PERSEPSI ANTI KORUPSI

I. INDEKS TOTAL, JUMLAH RESPONDEN, JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN

Nilai Indeks & Detil Responden

Q Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | Data Layanan | Nilai Per Unsusur

ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NILAI INDEKS
4,00 / 100,00 %
 Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

Kategori	Detail
JUMLAH	37 RESPONDEN
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 18 ORANG PEREMPUAN : 19 ORANG
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG Diploma 2 : 0 ORG SD : 0 ORG Diploma 3 : 1 ORG SMP : 0 ORG S1 : 29 ORG SMU : 7 ORG S2 : 0 ORG Diploma 1 : 0 ORG S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 12 ORG TNI : 0 ORG WIRAUSSAHA : 0 ORG POLRI : 2 ORG TENAGA KONTRAK : 0 ORG LAINNYA : 15 ORG

II. DOMISILI RESPONDEN

Nilai Indeks & Detil Responden

Q Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | Data Layanan | Nilai Per Unsusur

Daerah Domisili	Jumlah (Orang)
1. JAWA TENGAH	2
2. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	34
3. JAWA TIMUR	1

III. UMUR RESPONDEN

Nilai Indeks & Detil Responden

Q Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | Data Layanan | Nilai Per Unsusur

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	6	16,22
29 - 39 Th	20	54,05
40 - 49 Th	7	18,92
50 - 59 Th	4	10,81
60 - 69 Th	0	0,00
Total	37	

IV. NILAI PERUNSUR

Nilai Indeks & Detil Responden

Q Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | Data Layanan | Nilai Per Unsusur

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	Keterangan
Jumlah	148	148	148	148	148	
NRR Per RL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000
NRR Tertimbang	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	4,000
IPAK ZI Unit Pelayanan						100,00

V. TIGA (3) UNSUR TERENDAH

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	148
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	148
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	148



PUBLIKASI ZI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

SURVEY ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Jumlah	37 RESPONDEN		
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 18		
	PEREMPUAN : 19		
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0	
	SD : 0	Diploma 3 : 1	
	SMP : 0	S1 : 29	
	SMU : 7	S2 : 0	
	Diploma 1 : 0	S3 : 0	
	Pekerjaan	PNS : 12	SWASTA : 8
		TNI : 0	WIRUSAHA : 0
POLRI : 2		TENAGA KONTRAK : 0	
LAINNYA : 15			

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	4,000
2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	4,000
3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Tiga (3) Unsur Terendah

Meskipun dalam dalam survey mendapatkan kategori sangat baik dengan nilai indeks 3,98/99,59%, masih ada beberapa layanan yang masih masuk dalam 3 (tiga) unsur terendah yaitu ;

1. Apakah prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ? (U3)
2. Apakah sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan pengadilan memberikan kenyamanan/mudah digunakan ? (U6)
3. Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) ? (U1)

2. Tindak Lanjut Tiga (3) Unsur Terendah

Dan dari 3 (tiga) unsur terendah itu akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1.
 1. Alur dan prosedur ini menjadi salah satu tugas pokok dari petugas layanan sehingga menekankan kepada petugas PTSP khususnya agar menerangkan alur dan prosedur dengan jelas agar pengguna layanan memahami layanan yang seharusnya diterima dan didapatkan. Dalam hali ini Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempunyai standar mutu pelayanan. Hal ini ditindak lanjuti dengan adanya apel pagi petugas PTSP dan adanya Hakim Pengawas PTSP yang memantau masalah – masalah yang ada di layanan kususnya PTSP.
 2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan/sitem pelayanan online di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah ada dan dapat di akses di website <https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/> dan juga ada nomor WhatsApp pelayanan yaitu 088297218177 yang dapat diakses oleh para pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Menyarankan kepada Petugas Layanan dan para pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mempermudah layanan agar mengakses website dan nomor WhatsApp tersebut.
 3. Menambah media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh pengguna layanan sehingga pengguna layanan dengan mudah antara lain membuat atau mencetak brosur – brosur dan jika memungkinkan sosialisasi tentang layanan melalui media televisi maupun radio tentang pelayanan dan persyaratan yang diperlukan oleh pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Mei 2024
Ketua Pengadilan Negeri